EKSISTENSI PENGADILAN HAM TERHADAP PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM

Gracesy Prisela Christy, Edmondus Sadesto Tandungan

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus, gpchristy@ukipaulus.ac.id

Abstrak

Masalah penegakan HAM selalu beriringan dengan masalah penegakan hukum, di mana hal ini menjadi salah satu hal krusial yang paling sering dikeluhkan oleh warga masyarakat pada saat ini. Yaitu lemahnya penegakan hukum. Penerapan hukum kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia ini berpedoman pada Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, di mana dalam Undang-undang tersebut disebut tentang pengadilan ad hoc yang dipakai untuk mengadili para pelanggar Hak Asasi Manusia di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan pengadilan HAM dalam penyelesaian pelanggaran HAM. Metode yang digunakan adalah Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan HAM merupakan sarana yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM berat. Pengadilan HAM berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM, termasuk penyelesaian perkara yang menyangkut kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Eksistensi; Pengadilan HAM; Pelanggaran HAM

Abstract

The issue of upholding human rights always goes hand in hand with the issue of law enforcement, where this is one of the crucial things that is most often complained about by citizens at the moment. Namely weak law enforcement. The application of law to human rights violations in Indonesia is guided by Law no. 26 of 2000 concerning Human Rights courts, where in this law it is stated about ad hoc courts which are used to try human rights violators in Indonesia. The aim of this research is to find out the role of human rights courts in resolving human rights violations. The method used is a research method using normative legal research methods. The research results show that the Human Rights Court is a tool that can be used to resolve cases of human rights violations, especially serious human rights violations. The Human Rights Court has the authority to examine and decide cases of human rights violations, including settling cases involving compensation, restitution and rehabilitation in accordance with statutory regulations.

Keywords : Existence; Human Rights Court; Human Rights Violation

1. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia yang disebut HAM bersifat universal, dalam arti meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, namun ia tetap mempunyai HAM tersebut. Selain bersifat universal, HAM juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang dialami seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki HAM tersebut. Menurut *Teaching Human Right* yang diterbitkan oleh perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak

yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.¹

Adapun ciri-ciri khusus dari HAM yang membedakan dengan hak-hak lain, yaitu :²

- a. Tidak dapat dicabut, HAM tidak dapat dihilangkan atau diserahkan
- b. Tidak dapat dibagi, semua orang berhak untuk mendapatkan semua hak, baik itu hak sipil, politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya.
- c. Hakiki, HAM merupakan hak asasi semua manusia yang sudah pada saat manusia itu lahir.
- d. Universal, HAM berlaku bagi semua orang tanpa memandang status, suku, jenis kelamin, atau perbedaan yang lainnya. Persamaan merupakan salah satu dari berbagai ide hak asasi yang mendasar.

Catatan sejarah Indonesia menunjukkan bahwa terjadinya pelanggaran HAM secara massif dilakukan oleh aparat sebenarnya bersumber dari tampilnya pemerintahan yang tidak demokratis dan otoriter. Pemerintahan otoriter, dengan kekuasaan yang selalu diakumulasikan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, yang telah dapat dengan mudah melakukan pelanggaran HAM dan menutup pintu bagi pengungkapannya kepada publik serta bagi upaya membawanya ke pengadilan secara fair.

Setiap negara yang meratifikasi kovenan atau konvensi HAM internasional, secara otomatis terikat dengan berbagai kewajiban hukum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar individu yang berada di bawah yurisdiksinya. Dapat dikatakan bahwa rezim HAM bersumber dari perjanjian internasional. Melalui perjanjian internasional ini, negara diberikan tanggung jawab untuk dapat menghormati, melindungi, dan memenuhi hak dan kebebasan dasar individu. Dengan demikian, negara sesungguhnya secara tidak langsung membatasi kedaulatannya sekaligus menginternasionalisasi individu sebagai subjek hukum dalam hukum internasional.³

Di samping pembentukan pengadilan HAM di Indonesia, juga dalam rangka memenuhi salah satu syarat negara hukum. Seperti dikemukakan oleh Frederick Julius Stahl, suatu negara hukum formal harus memenuhi 4 (empat) unsur penting yaitu:

- a. Adanya perlindungan terhadap HAM,
- b. Adanya pemisahan / pembagian kekuasaan,

¹ A. Ubaedillah, 2012, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana, hal. 148

² Sarinah, 2017, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish. hal. 77

³ Knut D. Asplund, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Jogjakarta: Pusham Ull dan University of Oslo, hal. 94

- c. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- d. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam hal ini jelas bahwa perlindungan terhadap HAM adalah merupakan unsur pertama bagi suatu negara hukum. Hal ini sesuai dengan tujuan negara reformasi, untuk mewujudkan suatu Indonesia baru, yaitu Indonesia yang lebih demokratis, menjunjung tinggi HAM dan menegakkan supremasi hukum. Perlindungan terhadap HAM tersebut dapat diberikan antara lain melalui pengadilan HAM. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui mekanisme nasional sudah menjadi pilihan bagi pemerintah dengan membentuk pengadilan di tingkat nasional merupakan sebuah pilihan tepat.⁴

Diundangkannya undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan terhadap keberadaan pengadilan HAM di Indonesia. Tinggal menunggu bagaimana realisasi pembentukannya dapat dilakukan segera mungkin dengan cara bertahap.

2. Metode

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dengan mengacu pada norma-norma hukum terkait Hak Asasi Manusia. Data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu norma hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan bahan hukum sekunder yaitu literatur berupa buku, jurnal, dan artikel terkait. Analisis data dalam artikel ini menggunakan analisis kualitatif dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang ada, kemudian dilakukan analisis berdasarkan norma hukum internasional maupun teori yang ada.

3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Bila kita berbicara tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM, maka akan selalu terjadi banyak perdebatan. Masih dalam konteks ini, HAM perlu dipahami sebagai suatu hal yang terus berkembang seiring dengan jaman. Sejak dideklarasikannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1945 hingga saat ini, pemahaman tentang HAM terus berkembang seiring dengan terjadinya berbagai peristiwa di seluruh belahan dunia. Artinya pemaknaan pelanggaran HAM juga terus berkembang dan terus diperbaharui Sebelum melangkah pada

⁴ Lina Hastuti, 2012, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Sebagai Upaya Pertama dan Terakhir Dalam Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Tingkat Nasional*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3, hal. 396

pemahaman tentang pelanggaran HAM, ada baiknya kita memahami basis dasarnya yaitu Hak Asasi Manusia.

Nilai Hak Asasi Manusia kemudian diterjemahkan dalam sejumlah hukum internasional yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia. Dalam instrumen hukum HAM yang berlaku di Indonesia melalui UU No. 39/1999, dalam pasal 8, 71, dan 72; negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM melalui implementasi dalam berbagai bentuk kebijakan. Dalam hal ini, pelanggaran terjadi dalam kondisi negara telah gagal untuk memenuhi salah satu di antara tiga kewajibannya⁵.

- a. Kewajiban untuk menghormati : semua kebijakan yang dikeluarkan harus dihormati oleh negara termasuk institusi dan aparatur negara. Hal ini dimaksudkan agar mereka tidak melakukan tindakan yang dapat melanggar keutuhan dari individu atau kelompok; atau melanggar kemerdekaan seseorang.
- b. Kewajiban untuk melindungi : kewajiban dimana negara beserta aparatur negara wajib melakukan tindakan seperlunya untuk melindungi dan mencegah seorang individu atau kelompok untuk melanggar hak individu atau kelompok lainnya. Termasuk perlindungan atau pelanggaran terhadap kebebasan seseorang.
- c. Kewajiban untuk memenuhi : negara mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjamin setiap orang untuk memiliki hak hukum dalam memenuhi kebutuhan yang termasuk dalam instrumen HAM, dimana hak itu tidak dapat dipenuhi secara pribadi.

Banyak orang yang terjebak melihat dalam “kaca mata” Hak Asasi Manusia bidang sipil dan politik. Pelanggaran yang kemudian dipahami dalam artian kekerasan fisik yang terjadi dan jatuh korban secara fisik (meninggal dan luka-luka). Sementara kasus seperti pengusuran paksa sejumlah orang dari satu wilayah tanpa prosedur yang sesuai dianggap bukan sebagai sebuah pelanggaran HAM. Tahun 1993, Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia di Vienna telah memberikan perspektif yang lebih luas terhadap pengertian pelanggaran HAM. Konferensi itu secara tegas menghasilkan pernyataan bahwa HAM terdiri dari hak bidang sipil, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Sehingga pelanggaran yang terjadi dalam bidang-bidang tersebut merupakan pelanggaran HAM yang memiliki saling keterkaitan dan mempengaruhi satu bidang dengan yang lainnya sehingga itu terjadi.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945

4. Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi Hak Asasi Manusia. Peran komisi nasional Hak Asasi Manusia sebagai mana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Bab VII pasal 75 sampai pasal 103. Pasal 75 menyatakan : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bertujuan : a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila UUD NRI Tahun 1945 dan piagam perserikatan bangsa-bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Untuk mencapai tujuannya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang Hak Asasi Manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati Hak Asasi Manusia dan kewajiban dasar manusia. Menurut Pasal 76 UU Nomor 39 Tahun 1999, guna mencapai arah tujuannya komnas HAM harus melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi mengenai Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan fungsi tersebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia harus terdiri dari tokoh masyarakat yang berdedikasi dan integritas tinggi serta menghayati cita-cita negara ini yang berdasarkan keadilan serta menghormati nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berada di ibukota negara dapat juga di dirikan di daerah sebagai perwakilan komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Untuk melaksanakan keempat fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia haruslah sesuai dengan amanah undang-undang fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia haruslah pengkajian atau penelitian (Research and Study), bertugas dan berwenang melakukan:

- a. Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional Hak Asasi Manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau relativikasi;
- b. Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia;
- c. Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;

- d. Studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain mengenai Hak Asasi Manusia;
- e. Pembatasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia;
- f. Kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang Hak Asasi Manusia.

Untuk melaksanakan bidang penyuluhan (education) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bertugas dan berwenang melakukan :

- a. Pengamatan pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
- b. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut di duga terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia;
- c. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
- d. Pemanggilan saksi untuk dimintai dan di dengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
- e. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
- f. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan ketua pengadilan;
- g. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan ketua pengadilan;
- h. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

Kemudian untuk melaksanakan fungsi mediasi (mediation), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bertugas dan berwenang melakukan :

- a. Perdamaian kedua belah pihak.
- b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.
- c. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.

- d. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada pemerintah untuk ditindak lanjuti penyaksiannya.
- e. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindak lanjuti.

Pasal 77 menyatakan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berasaskan Pancasila yang mengandung pengertian bahwa landasan hukum komnas HAM adalah berasaskan pancasila yaitu yang berarti komnas HAM menjalankan peran fungsi dan tugasnya tentunya dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dari sila ke-1 hingga sila ke-5. Di saat menjalankan perannya komnas HAM dalam menegakkan Hak Asasi Manusia sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang ada di wilayah Indonesia selaras dengan falsafah bangsa Indonesia Pancasila, bukan berpanutan pada paham selain paham pancasila, yang nantinya penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia sesuai dengan pedoman-pedoman yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Hak Asasi Manusia bercirikan nilai-nilai falsafah bangsa. Landasan hukum komnas HAM pada awalnya adalah keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia⁶. Sejak 1999 keberadaan Komnas HAM di dasarkan pada Undang-undang yakni Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 yang juga menetapkan keberadaan, tujuan fungsi, keanggotaan, asas kelengkapan, serta tugas dan wewenang Komnas HAM. Disamping kewenangan menurut Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999⁷, juga berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dengan dikeluarkannya Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dalam melakukan penyelidikan ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat membentuk Tim ad hoc yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang guna mencapai tujuannya, komnas HAM menggunakan sebagai acuan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, baik nasional maupun internasional yaitu : 1. Instrumen nasional terdiri dari : a. Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya. b. Tap MPR No. XVII/MPR/1998. c. UU No. 39 tahun 1999 d. UU No. 26 tahun 2000 e. Peraturan perundang-undangan nasional lain yang terkait. 2. Instrumen Internasional : a. Piagam PBB, 1945. b. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948⁸. c. Instrumen internasional lain mengenai Hak Asasi Manusia yang telah disahkan

⁶ Seodjono Dirjdjosisworo, 2002, *Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

dan diterima Indonesia. Pasal 78 menyatakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mempunyai kelengkapan yang terdiri dari : a) Sidang Paripurna; dan b) Sub Komisi 2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mempunyai sebuah sekretariat jenderal sebagai unsur pelayanan. Pasal 83 menyatakan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berjumlah 35 orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan diresmikan oleh Presiden selaku kepala negara. Yang dimaksud dengan “disesuaikan oleh Presiden” adalah dalam bentuk Keputusan Presiden penyesuaian oleh Presiden dikaitkan dengan kemandirian Komnas HAM. Usulan yang dimaksud harus menampung seluruh aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan yang jumlahnya paling banyak 10 orang.

Lembaga Komnas HAM dalam menanggapi pelanggaran HAM biasa dapat menyerahkan perkara-perkara tersebut ke pengadilan umum guna untuk diproses secara hukum, sedang dalam menangani pelanggaran Hak Asasi Manusia berat Komisi Nasional berwenang menyelidiki pelanggaran Hak Asasi tersebut, dalam melakukan penyelidikan ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga dapat membentuk Tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau unsur masyarakat.

5. Upaya Penyelesaian Dalam Kasus Hak Asasi Manusia di Indonesia

Sarana penyelesaian yang digunakan dalam penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia di Indonesia tentunya dengan mengedepankan normanorma kaidah hukum yang berlaku dalam menyelesaikan permasalahan- permasalahan hukum. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu perdamaian kedua belah pihak, penyelesaian perkara melalui cara konsultasi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Penyelesaian perkara terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia di wilayah Indonesia tentunya harus mempertimbangkan kaidah-kaidah yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Maka dari itu seyogyanya pelaksanaan segala kebijakan republik terhadap masyarakat yang terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM tentunya berkiblat kepada nilai-nilai budaya, sosial, agama dan ekonomi masyarakat itu sendiri.⁹

Dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dengan damai dan bermartabat diperlukan suatu cara yang terus menerus dan tuntas hingga ke akar segala permasalahan di propinsi itu. Mulai dari segi ekonomi hingga pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri bukan muncul karena tidak bersebab terjadinya pelanggaran-pelanggaran di karenakan terjadinya

⁹ Abdul Hakim G Nusantara, 2004, *Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM. Vol 2. No. 2.

benturan-benturan kepentingan antara daerah dengan pusat, ketidakadilan yang telah lama dirasakan oleh masyarakat di sana karena dianggap sebagai sapi perahan kebijakan pusat yang tanpa peduli untuk membangun daerah yang telah memberikan pendapatan bagi anggaran pendapat belanja negara.

Terlepas dari siapa yang mulai membuat situasi yang dishormonisasi dalam masyarakat yang terjadi pelanggaran HAM, haruslah disadari sarana penyelesaian dengan kekerasan atau senjata sudah tidak efektif dalam menyelesaikan segala permasalahan. Sarana penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak lapisan masyarakat tentunya penyelesaian yang mengedepankan nilai-nilai manusia tentu dengan menggunakan cara-cara yang lebih manusiawi yaitu dengan cara mediasi dialog damai antara kelompok-kelompok yang bertikai. Karena sarana penyelesaian dengan damai lebih menguntungkan segala pihak-pihak yang bertikai dan dapat mengurangi dampak kerugian akibat terjadinya peperangan.

Sarana penyelesaian melalui perundingan, dialog lebih arif dan bijaksana daripada penyelesaian masalah dengan senjata. Manusia dimanapun ketika dihargai dan dihormati nilai-nilai dasar sebagai manusia, tidak akan merendahkan Hak Asasi Manusia lainnya namun sebaliknya, itulah mengapa para pengamat para tokoh-tokoh negarawan lebih mengedepankan penyelesaian permasalahan pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan cara damai dan lebih bermartabat. Penegakan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak dapat ditegakkan selama pola pemikirannya hanya bersandar pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia suatu negara. Sebab penegakan terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam setiap wilayah negara akan berbeda-beda karena dipengaruhi oleh kultur budaya, sosial dan religius suatu bangsa, jika Indonesia ingin penegakan Hak Asasi Manusia berdiri di negara ini serta harus sesuai dengan nilai kaidah yang ada di dalam jiwa bangsa Indonesia, selama itu belum dipahami nilai penegakan Hak Asasi Manusia hanya sebagai platform belaka. Dalam penyelesaian perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia berat maka sarana penyelesaiannya di dalam pengadilan Hak Asasi Manusia.

Sarana penyelesaian terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Yang dimaksud dengan memeriksa dan memutuskan dalam ketentuan ini adalah termasuk penyelesaian perkara yang menyangkut kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat terdiri dari kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai dengan "*Roma Statute of the International Criminal Court*" 2) Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden. 3) Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan peradilan umum.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia terutama di daerah-daerah telah sangat menyedihkan sanubari bangsa Indonesia selaku bangsa yang menjunjung tinggi nilai dan harkat serta martabat seorang manusia di muka bumi ibu pertiwi. Peristiwa-peristiwa dari waktu ke waktu masih saja terus berlangsung walau instans terjadinya mengalami suatu pasang surut adakalanya kejadian pelanggaran Hak Asasi Manusia rendah dan di lain waktu meningkat. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia yang berbudi luhur berdasarkan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila Negara Indonesia dalam hal ini pemerintah yang mempunyai amanah dari rakyat, yang mana amanah itu untuk meninggikan kesejahteraan dan kedamaian antar sesama masyarakat sudah seyogyanya berikhtiar untuk mencari cara penyelesaian yang mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan yang beradab dan berkepribadian luhur.

Memang dalam rangka untuk mengurangi sampai menghapuskan bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia bukan suatu pekerjaan yang mudah dan asal-asalan melainkan dibutuhkan suatu kinerja dari segala elemen bangsa Indonesia untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi penegakan Hak Asasi Manusia tentu dengan penyelesaian yang demokratis, komprehensif dan menyentuh hati nurani masyarakat itu sendiri. Permasalahan di wilayah NKRI yang berkenaan dengan kasus-kasus kekerasan yang mengakibatkan bermuara pelanggaran Hak Asasi Manusia harus dapat menguraikan variabel variabel mengapa terjadi pelanggaran tersebut, dalam hal untuk mencari akar permasalahan tentu harus diidentifikasi terlebih dahulu dengan menelusuri data-data yang ada di dalam masyarakat, sebab di sana sesungguhnya endapan dilema-dilema yang harus diaktualisasi guna terselesaikan.

Permasalahan pelanggaran Hak Asasi Manusia di wilayah Indonesia memang sudah menjadi topik aktual yang selalu di bicarakan untuk dicarikan upaya-upaya penyelesaiannya namun hingga saat ini, dari masa reformasi hingga masa pasca tsunami masih saja dan belum terselesaikan, ini haruslah dicermati dan di pahami dengan seksama oleh semua pihak. Dari zaman Kepresidenan BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga sekarang pada masa pemerintahan Joko Widodo memimpin bukan tidak pernah di selesaikan melalui kebijakan kebijakan pusat yang mencoba untuk untuk mengakomodir semua kepentingan dan hasrat masyarakat lokal, masih saja belum cukup dalam rangka untuk menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Ada beberapa hal yang harus dicermati oleh pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan eksekutif dan sebagai aparatur negara yang bertugas

sebagai abdi masyarakat harus menerapkan asas “good government”, masyarakat sebagai “public actor” di lapangan, aparat keamanan sebagai petugas keamanan di wilayah dan lapisan masyarakat lainnya yang dapat menjadi faktor kendala- kendala terhadap penegakan HAM disana yang disebabkan oleh diantaranya pemerintah selaku “policy obligation”; TNI POLRI sebagai petugas keamanan; masyarakat selaku “civil actor”; dan kelompok dalam masyarakat.¹¹ Pemerintah adalah salah satu penyebab dapat terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh karena itu memunculkan kendala- kendala yang mengakibatkan tidak dapat terselesaikannya permasalahan di Indonesia seperti dalam hal pengambilan kebijakan- kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak mengenai dan menyentuh dasar permasalahan “basic problem” yang ada di wilayah daerah rawan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Dalam rangka penegakan hukumnya pemerintah hanya sekedar menyelesaikan masalah pada lapisan kulitnya saja “liptic spare” seperti sidang pengadilan Hak Asasi Manusia yang terkesan sandiwara politik, diadili prajurit yang berpangkat rendah sebagai pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam hal untuk mengusut pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi para “actor eksekutif” terkesan bertele- tele dan lamban sehingga memunculkan “stereothipe” masyarakat terhadap proses penegakan hukum “law suprimacy” tidak fair ataupun setengah hati “a half heart”. Pemerintah juga terkesan dalam melakukan diplomasi perdamaian “diplomacy of peace” terkesan tidak serius yaitu menggunakan jalur diplomasi pada tataran eksekutif tetapi ditataran akar rumput “grass root” yang menggunakan langkah- langkah militer. Sehingga berakibat pada pelayanan aparatur daerah seperti pegawai pemerintah daerah dari kabupaten hingga ke desa banyak yang pergi maupun pindah. Hal ini berimbas pada pelayan dan pengabdian aparatur negara tidak memadai dan maksimal di wilayah- wilayah pelanggaran HAM karena rentan terhadap tindak kekerasan yang di lakukan oleh pihak- pihak yang bertikai di sana.

Semua itu adalah hal- hal yang krusial yang harus coba dicermati dan di selesaikan dalam hal untuk menyelesaikan dan melenyapkan pelanggaran Hak Asasi Manusia di NKRI dan untuk pihak- pihak yang bersitegang harus lebih arif dan bijaksana dalam menangani semua permasalahan yang ada di lapisan “akar rumput” supaya dapat mengurangi pelanggaran Hak Asasi Manusia.

¹¹ UID, Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia, Ditinjau dari Segi Pancasila dan UUD 1945 . 2007 . hal 11

6. Kompetensi Pengadilan HAM

Ada beberapa dokumen-dokumen internasional yang dilahirkan baik oleh PBB, maupun yang ada sebelum PBB mengatur HAM sekaligus menjadi landasan Yuridis HAM yang dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. *The international Bill Human Rights.*
- b. *Order Major Human Rights Documents.*

Pada prinsipnya *The international Bill of Human Rights*, *Order Major Human Rights Documents* adalah aplikasi dari pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia. *The international Bill of Human Rights* sifatnya umum, tidak hanya tertuju pada satu aspek tertentu. Pada sisi lain, *Order Major Human Rights Documents* mengarah pada satu objek tertentu. di Indonesia pada Tahun 1966, telah dirumuskan suatu piagam hak-hak asasi manusia dan hak-hak serta kewajiban warga negara¹². Dalam pasal 1 piagam tersebut ditegaskan, bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan dibekali dengan hak-hak asasi yang berimbalan dengan kewajiban-kewajiban.

Di samping piagam tersebut di atas yang mengatur, melindungi serta menjamin hak-hak asasi manusia, diatur, dilindungi dan dijamin pula dalam berbagai aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia, seperti dalam setiap sila Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (alinea I,II,III dan IV). Beberapa pasal dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 (sebagai aturan pokok) yang telah dibuatkan sebagai aturan perundang-undangan organik sebagai penjabaran dan pelaksanaan yang lebih kongkrit.

Penentuan kompetensi pengadilan HAM adalah sangat penting dan perlu dirumuskan dengan cermat, guna mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antara pengadilan HAM dengan pengadilan pidana. Pembunuhan atau dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi seseorang (hak untuk hidup) dan perbuatan ini dapat dijerat melalui pasal 340 KUHP, dan diadili oleh pengadilan pidana dan bukan oleh pengadilan HAM.

Menurut ketentuan pasal 4 undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Dari ketentuan pasal ini jelas bagi kita bahwa tidak semua pelanggaran HAM dapat diadili oleh pengadilan HAM, seperti contoh kasus pembunuhan di atas, tetapi terbatas pada "pelanggaran HAM yang berat". Yang dimaksud dengan pelanggaran HAM yang berat menurut ketentuan Undang-Undang No.26 Tahun 2000, adalah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 yang

¹² Karlina Leksono dan Supelli, *Tak ada Jalan Pendek Menuju Rekonsiliasi*, Jurnal Demokrasi dan HAM, (Jakarta : ID H-THC, 2001) Vol 1 No. 3. Hal 9.

berbunyi sebagai berikut: “ Pelanggaran HAM yang berat meliputi: a) Kejahatan genosida, b) Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dalam lingkup hukum internasional, pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan internasional dan dianggap sebagai musuh bersama umat manusia karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, penyelesaiannya secara hukum menjadi tanggung jawab semua umat manusia dengan cara menghukum pelakunya secara adil.¹³

Yang dimaksud dengan kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara:

- a. Membunuh anggota kelompok;
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok;
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh maupun sebagian;
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok;
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain (Pasal 8 Undang-Undang No 26 Tahun 2000)

Pasal tersebut mengatur tentang kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, diadopsi dari pasal 6 dan Pasal 7 *Rome Statute of International Criminal Court*. Pengadilan HAM menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, disamping berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat terjadi di teritorial wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (asas teritorialitet), juga berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh warga negara diluar teritorial wilayah kesatuan Republik Indonesia (asas nasionalitet).

Hal ini berarti bahwa seorang yang berumur di bawah 18 tahun yang melakukan pelanggaran HAM yang berat, tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bukan oleh pengadilan HAM. Dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, dinyatakan bahwa dalam kewenangan memeriksa dan memutus yang dimiliki pengadilan HAM, termasuk penyelesaian perkara yang menyangkut kompensas, restitusi, dan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Seperti telah dikemukakan sebelumnya,

¹³ Asmara Nababan, 2004, *Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat: Belajar dari Pengalaman*, Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Vol.2 NO.2, hal. 94.

pelanggaran HAM yang berat itu meliputi: kejahatan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan untuk dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁴

- a. Adanya serangan yang meluas atau sistematis;
- b. Diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil;
- c. Serangan itu sebagai kelanjutan kebijakan yang berhubungan dengan organisasi. Apakah kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan tidak memenuhi ketiga unsur tersebut, maka perbuatan itu digolongkan pada tingkat pidana biasa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diadili oleh pengadilan pidana dan bukan oleh pengadilan HAM.

Jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang dapat diperiksa atau diputus oleh pengadilan HAM adalah :

- a. Kejahatan genosida yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :
 - 1) Membunuh anggota kelompok;
 - 2) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
 - 3) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian;
 - 4) Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau ;
 - 5) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan itu ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil yang berupa :
 - 1) Pembunuhan, dengan rumusan delik sebagaimana pasal 340 KHUP.
 - 2) Pemusnahan, yaitu meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja, antara lain berupa perbuatan menghambat pemasokan barang makanan dan obat-obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan pada sebagian penduduk.

¹⁴ Seodjono Dirjdjosisworo, *Op.cit*, hal.145

- 3) Perbudakan, dalam ketentuan ini termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak.
- 4) Pengusiran dan pemindahan penduduk secara paksa, yaitu pemindahan orang-orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan yang lain dari daerah dimana mereka bertempat tinggal secara sah, tanpa disadari alasan yang diijinkan oleh hukum ternasional.
- 5) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.

Definisi bahwa serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil menurut UU No. 26 Tahun 2000 adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi. Jenis-jenis kejahatan yang termasuk genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah jenis kejahatan yang diadopsi dari ketentuan Statuta Roma 1998 (*Rome Statuta of The International Criminal Court*). Dari penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur kejahatan dalam UU No. 26 Tahun 2000 ini dipersamakan dengan pengaturan dalam Statuta Roma termasuk mengenai unsur meluas dan sistemik.

Penerjemahan konsep dalam klasifikasi perbuatan di bawah definisi kejahatan terhadap kemanusiaan, khususnya yang berkaitan dengan penerjemahan “*persecution*” menjadi “penganiayaan” dalam UU No. 26 Tahun 2000 juga merupakan tantangan pembuktian yang tak mudah bagi jaksa. Karena tidak ada penjelaasn definitif yang detail, maka acuan definisi dirujuk kepada definisi “penganiayaan”¹⁵ dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Padahal, *persecution* memiliki arti yang lebih luas merujuk pada perlakuan diskriminatif yang menghasilkan kerugian mental maupun fisik ataupun ekonomis. Artinya tidak mensyaratkan perbuatan yang langsung secara ditujukan pada fisik seseorang. Dengan digunakannya kata “penganiayaan” maka tindakan teror dan intimidasi yang sifatnya non-fisik atas seseorang atau kelompok sipil tertentu atas dasar kepercayaan politik menjadi tidak termasuk dalam kategori tersebut, dan jaksa harus membuktikan adanya tindakan fisik yang terjadi dan bukan hanya akibat yang ditimbulkan.

¹⁵ Andi Hamzah, 1990, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

7. Kesimpulan

Pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia menjadi suatu permasalahan hukum yang membutuhkan perhatian serius bagi seluruh pihak. Adanya berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian yang diderita oleh korban maupun keluarga korban, di mana kerugian tersebut dapat berbentuk materi maupun non materi. Berbagai peristiwa telah menunjukkan bahwa keberadaan Pengadilan HAM untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM sangat dibutuhkan. Pengadilan HAM sendiri memiliki kekhususan dalam menyelesaikan pelanggaran HAM, seperti penyelesaian HAM yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dibentuk. Selain itu keberadaan pengadilan HAM juga dapat menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang tidak termasuk dalam pelanggaran HAM biasa yang penyelesaiannya melalui pengadilan umum. Mengingat kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran HAM dapat bersifat materi maupun non materi, penyelesaian perkara yang dilakukan dalam Pengadilan HAM dapat menyangkut penyelesaian dengan menyertakan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

Referensi

- A. Ubaedillah, 2012, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana
- Abdul Hakim G Nusantara, 2004, *Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM. Vol 2. No.2.
- Abul A'la Maududi, 1985, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Bandung: Pustaka.
- Andriganto Seno Adji, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc yang Objektif*, Kompas, 2 Februari 2002.
- Andi Hamzah, 1990, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Asmara Nababan, 2004, *Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat: Belajar dari Pengalaman*, Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Vol.2 N0.2.
- Karlina Leksono Supelli, 2001, *Tak Ada Jalan Pendek Menuju Rekonsiliasi*, Jurnal Demokrasi dan HAM, Jakarta: ID H-THC.
- Knut D. Asplund, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Jogjakarta: Pusham UII dan University of Oslo
- Koffi Anam, *Buletin Wacana Hak Asasi Manusia*, Pesan Sekretaris Jenderal PBB Memperingati Hari HAM ke- 57, Edisi 20 tahun III/ Desember 2005.

Lina Hastuti, 2012, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Sebagai Upaya Pertama dan Terakhir Dalam Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Tingkat Nasional*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3

Sarinah, 2017, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Seodjono Dirjdjosisworo, 2002, *Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia